

BAB II

TINJAUAN TENTANG SEJARAH DAN PROFIL AIPA

A. Sejarah AIPA menjadi AIPO

Pada pertengahan tahun 70an, ASEAN membentuk suatu forum bagi anggota parlemen ASEAN untuk mendiskusikan serta membahas isu-isu regional, yaitu ASEAN Parliamentary Meeting (APM). Pada pertemuan perdana dari APM ini, Indonesia lah yang menjadi tuan rumah, yaitu pada tanggal 8-11 Januari 1975. kemudian APM berubah nama menjadi AIPO atau ASEAN Inter-Parliamentary Organisation (AIPO) yang disepakati oleh ASEAN dalam pertemuan ketiga di Manila, Filipina pada tahun 1977. General Assembly AIPO yang pertama diadakan di Singapura pada tanggal 26-28 September 1978.¹³

a. Definisi AIPA dan tujuan AIPA

AIPA merupakan sekumpulan parlemen-parlemen Asia Tenggara yang dibentuk pada tahun 1977¹⁴. seperti indonesia , malaysia, singapore, thailand. Organisasi ini mempunyai visi dan misi khusus dalam mendorong tercapainya ASEAN Community 2015

b. Pergantian AIPO menjadi AIPA

Proses pergantian AIPO menjadi AIPA dimulai berawal dari adanya Sidang Umum ke-27 ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) telah berhasil menyepakati rekomendasi yang dihasilkan oleh *Ad-Hoc Committee* untuk

¹³The Transformation And Renaming Of The Asean Inter-Parliamentary Organisation (Aipo) To The Asean Inter-Parliamentary Assembly (Aipa) (<http://www.aipasecretariat.org/about/the-renaming-of-ibif-aipo-to-aipa/> Diakses Pada Tanggal 21 November 2014)

¹⁴Ibid

melakukan transformasi AIPO menjadi suatu institusi yang lebih efektif dan terintegrasi melalui beberapa keputusan yakni melakukan perubahan nama AIPO menjadi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dan membuat amandemen terhadap Statuta AIPO¹⁵.

Perubahan nama ini merupakan inisiatif Delegasi DPR RI yang patut dianggap sebagai salah satu keberhasilan diplomasi parlemen Indonesia. Delegasi DPR RI, dalam Sidang yang dibuka secara resmi oleh H.E. Jose de Venecia, Jr., Ketua Parlemen Filipina selaku Presiden AIPO tersebut, dipimpin oleh Ketua DPR RI Bpk. H. R. Agung Laksono serta didampingi oleh 14 anggota delegasi lainnya. Sidang Umum ke-27 AIPO ini diselenggarakan pada 10-15 September 2006 di Cebu City, Filipina. Sidang dihadiri oleh para anggota parlemen dari 8 Negara Anggota AIPO (Kamboja, Indonesia, Malaysia, Laos, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam), 2 negara Peninjau Khusus (Brunei Darussalam dan Myanmar), dan 9 negara mitra dialog AIPO (Australia, Kanada, China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Papua Nugini dan Federasi Rusia dan Parlemen Eropa). Sidang ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa komisi diantaranya Committee on Women of AIPO Matters, Committee on Political Matters, Committee on Economic Matters, Committee on Social Matters, Committee on Organizational Matters dan Committee on Dialogue with Observer Countries.

B. Struktur Keanggotaan AIPA

¹⁵Siaran Pers Hasil Sidang Umum Ke-27 Asean Inter-Parliamentary Organization (Aipo), Cebu City, Filipina, 10-15 September
[https://www.dpr.go.id/complorgans/inter/pers/Siaran_Pers_Hasil_Sidang_Umum_Aipo_Ke-27_Cebu_City_Filipina_\(28-9-06\).Pdf](https://www.dpr.go.id/complorgans/inter/pers/Siaran_Pers_Hasil_Sidang_Umum_Aipo_Ke-27_Cebu_City_Filipina_(28-9-06).Pdf) Diakses Pada Tanggal 24 November 2014

Keanggotaan AIPA ini terbuka untuk semua parlemen nasional anggota ASEAN negara. Sejak 2011, sepuluh anggota ASEAN menjadi anggota AIPA. Struktur anggota AIPA terdiri dari Majelis Umum, Presidency, Komite Eksekutif, Ad-hoc Commite¹⁶. Dalam struktur keanggotaan AIPA mempunyai fungsi dan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Majelis Umum

Majelis Umum merupakan badan pengambil keputusan yang mengadakan pertemuan tiap tahun. Setiap negara anggota mengirimkan 15 delegasi. Tiap delegasi dipimpin oleh Ketua DPR atau wakilnya, dan diantara delegasi itu, 5 orang diantaranya harus perempuan¹⁷. Untuk menjamin kontinuitas, diantara delegasi itu, 5 orang diantaranya harus pernah mengikuti rapat Majelis Umum sebelumnya. Keputusan Majelis Umum berbentuk resolusi atau rekomendasi. Segala putusan harus berdasarkan consensus. Majelis Umum didukung oleh 6 Panitia Pelaksana, Komite Pengkajian, dan Komite *ad hoc*.

2. Komite Eksekutif

Komite Eksekutif adalah badan eksekutif di bawah arahan Majelis Umum. Keanggotaan Komite Eksekutif terdiri 3 anggota parlemen dari masing-masing Anggota Parlemen, salah satunya akan menjadi Speaker atau

¹⁶Ibid

¹⁷Aipa, Benarkah Merupakan Parlemen.

Regional?Http://Regional.Kompasiana.Com/2014/03/24/Aipa-Benarkah-Merupakan-Parlemen-Regional-641804.Html Diakses 14 November 2014

wakilnya. Presiden AIPA adalah ketua Komite Eksekutif¹⁸. Ketua memiliki kekuatan untuk mengadakan pertemuan guna membahas masalah.

Berdasarkan Pasal 17 Statuta AIPA dari, kewenangan dan fungsi Komite Eksekutif adalah sebagai berikut:

- a. untuk mempertimbangkan dan merekomendasikan keanggotaan dalam AIPA dan berpartisipasi sebagai pengamat khusus
- b. untuk mengembangkan inisiatif baru untuk kegiatan AIPA
- c. untuk memantau pelaksanaan resolusi yang disetujui oleh Majelis Umum
- d. untuk mempersiapkan agenda dan program yang seperti yang diusulkan oleh anggota Parlemen untuk persetujuan Majelis Umum
- e. mengusulkan pembentukan standing, studi dan komite ad hoc bila diperlukan
- f. untuk mengarahkan, memantau dan mengawasi Sekretariat Tetap
- g. untuk merekomendasikan pengangkatan staf Sekretariat Tetap
- h. untuk merumuskan aturan prosedurnya sendiri.

3. Komisi, Komite Studi dan Ad Hoc Committee

Dengan persetujuan Majelis Umum, agenda yang diusulkan oleh Komite Eksekutif akan dibahas secara rinci oleh Komite yang dibentuk oleh Majelis Umum. Komite Standing saat bersidang selama Majelis Umum adalah Komite Matters Politik, Komite Matters Ekonomi, Komite Matters Sosial, Komite Matters

¹⁸Giving The Asean Inter-Parliamentary Assembly A Voice In The Asean Community www.idea.int/resources/analysis/loader.cfm Diakses Pada Tanggal 24 November 2014

¹⁸Ibid

Organisasi, Komite Komunike Bersama, dan Komite Dialog dengan Observer Negara¹⁹.

Selain dari Komite Tetap yang diselenggarakan secara rutin selama setiap Majelis Umum, sesuai dengan Pasal 18 Statuta AIPA dari, Majelis Umum memiliki kewenangan untuk membentuk Komite Studi dan Ad Hoc Komite, bertanggung jawab membahas isu-isu spesifik yang terkait dengan pembangunan bersama dan kepentingan bersama AIPA Anggota Parlemen, khususnya di bidang legislasi, melalui kerjasama yang lebih erat di antara Anggota Parlemen AIPA²⁰.

Dalam dekade terakhir, isu-isu kepentingan umum yang telah dibahas oleh Komite Studi AIPA dan Ad Hoc Komite adalah sebagai berikut:

- a. Legislasi umum tentang Narkotika, Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Narkoba
- b. Kelayakan Pembentukan Komite Legislatif ASEAN
- c. Hak Asasi Manusia
- d. Lingkungan dan Perlindungan Satwa Liar
- e. Sumber Daya Kelautan dan Pesisir
- f. Peningkatan Sekretariat Tetap AIPA
- g. Hukum ASEAN Terkait atau Memiliki Dampak Pelaksanaan AFTA (ASEAN Free Trade Area)
- h. Hukum ASEAN Terkait Pengembangan Pariwisata dan Sumber Daya Manusia
- i. Peran Badan Legislatif ASEAN dalam Menghadapi Krisis Ekonomi dan Keuangan Daerah
- j. Kerjasama ASEAN Kesehatan Masyarakat

¹⁹Perubahan Statuta The Asean Inter-Parliamentary Organisasi (Aipo)
[Http://www.aipo.org/](http://www.aipo.org/) Diakses Pada 24 November 2014

²⁰Ibid

4. Woman Parliament of AIPA (Waipa)

Woman Parliament of AIPA (Waipa) didirikan pada tahun 1998 sebagai cabang dari AIPA. Pertemuan Waipa diadakan di tahunan Majelis Umum AIPA dan yang diketuai oleh salah satu wanita anggota parlemen dari negara tuan rumah.²¹

Maksud dan tujuan dari Waipa adalah:

- a. Untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam AIPA dengan berusaha untuk membawa peningkatan jumlah perempuan delegasi ke acara AIPA
- b. Untuk lebih meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen di seluruh ASEAN
- c. Untuk memastikan bahwa hal-hal yang menjadi perhatian khusus untuk perempuan diletakkan dalam agenda Majelis Umum AIPA
- d. Mengusulkan topik untuk Komite Studi AIPA dan mengorganisir konferensi untuk tujuan tersebut
- e. Untuk bertemu setiap tahun pada saat Sidang Umum AIPA ini
- f. Untuk memfasilitasi jaringan antara perempuan anggota parlemen ASEAN
- g. Untuk membangun jaringan dengan asosiasi perempuan lain dan pertemuan perempuan dalam organisasi-organisasi internasional seperti Asosiasi Parlemen Persemakmuran dan Uni Inter-Parliamentary.

²¹Perubahan Statuta The Asean Inter-Parliamentary Organisasi (Aipo)
[Http://Www.Aipo.Org/Diakses](http://www.aipo.org/diakses) Pada 24 November 2014

5. Permanen Sekretariat

Terletak di Jakarta, Sekretariat Tetap AIPA didirikan pada tahun 1990 oleh Majelis Umum ke-11 sebagaimana diizinkan oleh Pasal 7 Statuta AIPA²². Sekretariat Tetap adalah pusat informasi dan kantor administrasi AIPA yang memfasilitasi dan memonitor semua kegiatan AIPA. Sejak pembentukannya, Sekretariat Tetap AIPA telah mengalami beberapa perubahan organisasi sejalan dengan perubahan kebutuhan dan kegiatan. Sekretaris Jenderal AIPA ditunjuk oleh Presiden AIPA dengan persetujuan Majelis Umum untuk masa jabatan tiga 3 tahun dengan pertimbangan rotasi dan dalam urutan abjad.

C. Mandate dan Fungsi AIPA

AIPA dalam parlemen ASEAN sebagai perantara antara masyarakat dan administrasi negara dan menganggap tanggung jawab utamanya menjadi perantara untuk mencapai tujuan ASEAN²³. Dengan maksud dan tujuan AIPA dengan ASEAN dan mendasari tujuan ini adalah visi bersama untuk mempromosikan perdamaian regional, stabilitas dan kemakmuran²⁴

Menurut Statuta nya, maksud dan tujuan AIPA ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempromosikan hubungan dan kerjasama yang erat antara Parlemen negara-negara anggota ASEAN, AIPA Pengamat Khusus dalam organisasi parlemen lainnya

²²Ibid

²³Asean, Statute Of The Inter-Parliamentary Organization, 1977. [Http://www.aipo.org/Statutes_of_Aipa.htm](http://www.aipo.org/Statutes_of_Aipa.htm) Diakses Pada Tanggal 20 November 2014

²⁴Statuta Aipo [Http://www.aipo.org/Statutes_of_Aipa.htm](http://www.aipo.org/Statutes_of_Aipa.htm) Diakses 20 November 2014

2. Untuk memfasilitasi pencapaian tujuan dari ASEAN sebagai dibentuk dalam Deklarasi ASEAN Agustus 1967 yang dibuat di Bangkok, Thailand serta ASEAN Vision 2020 dengan mempertimbangkan Bali Concord II 2003 menyebabkan realisasi Komunitas ASEAN berdasarkan tiga (3) pilar: Komunitas ASEAN Security (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC)
3. Untuk membangun dan mempertahankan pertukaran dan penyebaran informasi serta koordinasi, interaksi, dan konsultasi dengan ASEAN untuk memberikan kontribusi parlemen untuk integrasi ASEAN dan mengakrabkan bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan kebijakan yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya komunitas ASEAN
4. Untuk belajar, berdiskusi dan menyarankan solusi untuk masalah yang menjadi kepentingan bersama dan mengekspresikan pandangan terhadap isu-isu tersebut dengan tujuan mewujudkan tindakan dan respon yang tepat waktu oleh anggota AIPA
5. Untuk menyimpan semua anggota Parlemen AIPA diberitahu tentang langkah-langkah yang diambil dan kemajuan yang dicapai oleh masing-masing Parlemen di realisasi maksud dan tujuan AIPA
6. Untuk mempromosikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, keamanan dan kemakmuran di ASEAN

D. Hubungan AIPA dengan ASEAN

Hubungan ASEAN dan AIPA tercantum dalam piagam masing-masing.

Dalam Piagam ASEAN berisi AIPA bagian yang terkait entitas dengan bunyi :

1. ASEAN dapat melibatkan entitas-entitas yang mendukung Piagam ASEAN, terutama tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya. Entitas-entitas dimaksud tercatat dalam .
2. Aturan-aturan pelaksanaan dan kriteria keterlibatan diatur oleh Komite Wakil Tetap atas rekomendasi Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Lampiran 2 dapat diperbarui oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atas rekomendasi Komite Wakil Tetap tanpa merujuk ketentuan mengenai Amendemen dalam Piagam ini.

(Art. 16 (1) dan Lampiran 2, ASEAN, *Piagam*, 2008) dan menunjukkan pentingnya memberikan kepada parlemen dan peran mereka dalam masyarakat bangunan. Untuk bagiannya, AIPA eksplisit mengakui ASEAN sebagai mitra dan termasuk bagian khusus dalam Statuta, di bawah Bab VIII, Pasal 17, pada Kemitraan Dengan ASEAN.

Langkah bertahap yang diambil untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara ASEAN dan AIPA . Dengan melalui hubungan antara organ, dan ini mungkin bisa menyebabkan hubungan dilembagakan. Kegiatan yang dilakukan untuk membangun kepercayaan dan hubungan di antara para pejabat dari AIPA dan ASEAN, seperti baru-baru ini menyimpulkan AIPA-ASEAN Sekretariat Retreat di Lombok, Indonesia .

Hal ini menyebabkan dialog membuka dan kerja sama antara kedua entitas pada tingkat politik tertinggi dan Dialog dimulai mengarah ke hubungan yang diperkuat. Sejak itu, pertemuan antara AIPA dan ASEAN pemimpin telah diselenggarakan setiap tahun selama Pertemuan KTT ASEAN. AIPA telah

mengadakan dialog atau konsultasi sesi dengan Panel Tingkat Tinggi ASEAN di penyusunan Piagam ASEAN dan Hak Asasi Manusia Tubuh ASEAN. Inisiatif untuk menjalin kerjasama antara Sekretariat AIPA dan Sekretariat ASEAN telah dimulai bahwa akan melihat kerjasama yang lebih erat dan pertukaran ide dan informasi.

ASEAN menuju integrasi regional mendorong AIPA menjadi lebih terlihat dan aktif. Sejak penerapan undang-undang baru pada tahun 2007, AIPA memiliki perlahan-lahan mengubah dirinya dari sebuah pertemuan sosial tahunan parlemen untuk majelis legislatif menyatakan komitmen mereka untuk bekerja untuk realisasi ASEAN yang terintegrasi. Kegiatan dimulai dengan berbagai kegiatan yang menangani isu-isu yang menjadi perhatian bersama di antara anggota ASEAN dengan maksud untuk terlibat dengan ASEAN dan organnya.

AIPA, melalui komite studi dan berbagai komite ad hoc, telah menyelenggarakan pertemuan, seminar dan loka karya tentang berbagai Sosialisasi seperti undang-undang umum pada narkoba, penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi, kelayakan pembangunan komite legislatif ASEAN, hak asasi manusia, lingkungan dan perlindungan satwa liar, sumber daya laut dan pesisir, peningkatan AIPA Permanent hukum Sekretariat ASEAN terkait dengan implementasi AFTA atau kawasan perdagangan bebas ASEAN, hukum ASEAN terkait dengan pariwisata dan manusia pengembangan sumber daya, peran badan legislatif ASEAN dalam menghadapi krisis ekonomi dan regional, kerjasama ASEAN pada kesehatan masyarakat, Tujuan Pembangunan Milenium dan peran anggota parlemen perempuan, bekerja migran, dan tata kelola sektor keamanan.

AIPA Caucus dibentuk pada tahun 2007 untuk mempercepat efektif kerjasama legislatif dan harmonisasi di negara-negara anggota²⁵. Diantara Tugas utamanya adalah untuk membantu Komite Eksekutif dalam memantau pelaksanaan resolusi AIPA; pengajuan permintaan negara atau status laporan dari negara-negara anggota; mengidentifikasi umum inisiatif legislatif oleh menilai kerangka hukum dan konstitusi yang ada dan mengidentifikasi dan menyelaraskan daftar hukum di ASEAN untuk memfasilitasi kerja sama regional untuk penegakan²⁶.

Pengajuan laporan negara, tidak terlihat di ASEAN, adalah inisiatif berani yang dapat beroperasi sebagai mekanisme dorongan atau tekanan untuk mereformasi dan menyelaraskan undang-undang dan kebijakan dan untuk berbagi praktik terbaik pada mata pelajaran yang mempengaruhi orang-orang diwilayah. Anggota parlemen telah merespon positif untuk mengirimkan negara laporan bidang studi seperti Millenium Development Goals (terutama MDG 5, meningkatkan kesehatan ibu dan mengurangi angka kematian ibu), memerangi obat-obatan terlarang, dan promosi dan perlindungan TKI²⁷.

Pada hal ini AIPA bekerja sama dengan berbagai lembaga PBB seperti UN Women, Organisasi Buruh Internasional, Organisasi migrasi Internasional, UNICEF dan PBB Kantor Narkoba dan Kejahatan. Akademisi dan ahli juga telah diundang untuk memberikan arahan bahaya narkoba²⁸.

²⁵Caucus Aipa Report

²⁶Ibid

²⁷Www.Aipo.Org

²⁸Ibid